

M. Subardin, Dampak Perkebunan Besar Kelapa sawit terhadap

**JURNAL
EKONOMI
PEMBANGUNAN**

Journal of Economic & Development
HAL: 47 - 60

**DAMPAK PERKEBUNAN BESAR KELAPA SAWIT
TERHADAP KESEJAHTERAAN RAKYAT**

**Oleh:
M. Subardin**

ABSTRACT

The development of oil palm plantation increase sharply in Kikim of Lahat District. However, the development was not followed by the improvement of people welfare (ie : villagers income) near by the plantation. This research attempts to answer the impact of oil palm plantation on villagers welfare. The result shows that health, housing and settlement facility, education level, as well as losing land (because plantation needs a large amount of land), reflects the lower condition of villagers. The decrease of quality of life people surrounding oil palm plantation relatively become very low

Keywords : Poverty, income distribution, welfare

PENDAHULUAN

Pembangunan perkebunan besar kelapa sawit selama 30 tahun terakhir merupakan salah satu faktor utama penyebab hilangnya kawasan hutan (*deforestasi*). Akan tetapi penelitian kehutanan di Indonesia sulit menyajikan data definitif mengenai luas hutan yang telah dikonversi menjadi perkebunan karena sumber data resmi sangat bervariasi dan tidak konsisten dari tahun ke tahun. Beberapa penelitian independen seperti yang dilakukan Casson (2000 : 48) dari Global Forest Watch dan Wakker (2000 : 6) dari Green Peace, menyebutkan bahwa total kawasan hutan yang dikonversi menjadi bentuk perkebunan antara tahun 1982 dan 1999 adalah 4,1 juta hektar. Dari angka total tersebut, terdapat 1,8 juta hektar hutan telah dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit antara tahun 1990 dan 2000 (Forest Watch Indonesia, 2001 : 51).

Pengembangan perkebunan kelapa sawit dengan mengkonversi hutan ternyata merupakan kebijakan yang didukung pemerintah. Pada tahun 1996 pemerintah Indonesia mengalokasikan 9,13 juta ha hutan untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit. Pada tahun 2000, total areal kawasan hutan yang secara prinsip telah disetujui untuk dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit telah mencapai lebih dari 8,5 juta ha dan yang telah

dikonversi menjadi lahan perkebunan di Indonesia telah mencapai hampir 5 juta ha. (Tandan Sawit No.4, 2001 : 7)

Kebijakan konversi hutan dan pengembangan perkebunan besar kelapa sawit dalam prakteknya ternyata menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap lingkungan maupun dampak sosial. Dampak lingkungan berupa salah satu sumber deforestasi, gangguan terhadap fungsi ekosistem dan bencana kebakaran hutan dan lahan Dampak sosial muncul karena sebelumnya masyarakat mengandalkan hasil hutan dan mengembangkan usaha pertanian rakyat, maka dengan masuknya perkebunan besar menyebabkan perubahan yang sangat mendasar pada tata cara pengusahaan sumberdaya alam yang akhirnya menimbulkan konflik sosial. Konflik ini disebabkan oleh diklaimnya lahan hutan dan pertanian masyarakat menjadi areal perkebunan kelapa sawit.

Sengketa lahan antara masyarakat dan investor disebabkan oleh diklaimnya lahan pertanian masyarakat atas nama suatu Hak (HGU, HPH, KP) oleh negara, merupakan implikasi dari kebijakan agraria yang tidak berpihak kepada rakyat. Secara keseluruhan, sengketa lahan akibat pemberian HGU perkebunan mendominasi kasus sengketa lahan antara petani dan investor yang terjadi di seluruh Kabupaten kecuali Belitung (sengketa pertambangan) dan Palembang (sengketa lahan perumahan PON). Luas lahan sengketa seluruhnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel I. Luas Lahan Sengketa Agraria di Sumsel Sampai Tahun 2001

No	Kabupaten/Kota	Luas Lahan Sengketa (ha)	%	Jumlah Korban (KK)	Jumlah Kasus Tanah
1	Musi Rawas	59.942	29,9	14.905	21
2	Muara Enim	47.580	23,7	15.832	45
3	Ogan Komering Ilir	44.593,65	22,4	5.234	16
4	Lahat	18.909,5	9,4	4.630	24
5	Ogan Komering Ulu	10.814,5	5,4	3.793	7
6	Musi Banyuasin	10.447,5	5,2	3.683	25
7	Bangka	6.669,5	3,3	1.351	10
8	Belitung	791,5	0,4	386	2
9	Palembang	606,59	0,3	509	13
	T O T A L	200.354,74	100	50.454	163

Sumber : Kompilasi Data Divisi Pertanahan LBH Palembang, 2001.

Pembangunan perkebunan besar kelapa sawit dapat memberikan dampak terhadap kesejahteraan rakyat di sekitar lokasi perkebunan. Dampak perkebunan besar kelapa sawit ini mencakup aspek sosial dan ekonomi terutama yang berhubungan dengan sumber mata pencaharian. Akan tetapi dampak perkebunan besar kelapa sawit meliputi tidak hanya areal kebun yang berproduksi melainkan juga suatu kawasan tertentu. Hal demikian terkait dengan cara perolehan areal tanaman kelapa sawit yang mengkonversi dustu kawasan hutan dan klaim atas lahan pertanian rakyat, sehingga dampak yang ditimbulkannya lebih luas dari sekedar produksi. Sejauh mana perkebunan kelapa sawit

memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan dan penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar atau justru sebaliknya menjadi faktor penyebab penurunan kesejahteraan masyarakat adalah penting untuk dikaji.

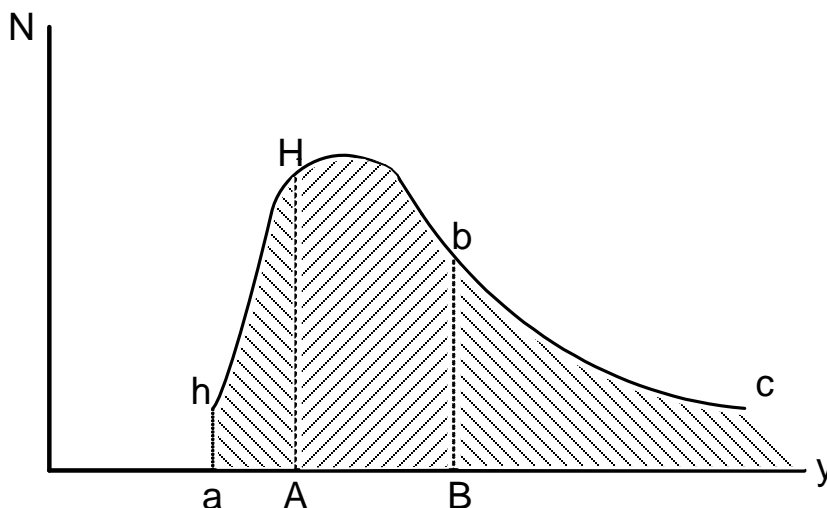
TINJAUAN PUSTAKA

Pengukuran tentang kesejahteraan salah satunya bertujuan untuk memperbandingkan berbagai keadaan ekonomi untuk menentukan apakah perubahan dan keadaan ekonomi yang satu ke arah keadaan ekonomi yang lain lebih baik atau lebih buruk. Dalam konteks penelitian ini terdapat dua keadaan ekonomi, yaitu sebelum adanya perkebunan besar dan setelah adanya perkebunan besar. Pembahasan mengenai perbandingan terhadap dua keadaan ekonomi dalam literatur ekonomi telah dikenal sebagai Kriteria Pareto atau Pareto Principle (Sudarsono, 1983 : 357-358), yang mencakup tiga buah kriteria, yaitu *Pareto Superior*, *Pareto Inferior*, dan *Pareto Optimal*.

Kriteria Pareto ini bertitik tolak pada pembahasan mengenai masyarakat sebagai suatu keseluruhan yang mempunyai tujuan untuk memaksimumkan kesejahteraan secara keseluruhannya. Konsep keseluruhan ini menunjukkan standar hidup masyarakat yang ingin dipenuhi akibat dari perubahan keadaan ekonomi berupa perbaikan kesejahteraan. Karena standar hidup manusia dan bagaimana mengukurnya untuk rumah tangga dan individu berbeda, maka Pareto juga menguraikannya secara personal untuk mendekati keadaan sebenarnya dari kesejahteraan masyarakat.

Vilfredo Pareto juga telah menyusun suatu hukum dalam distribusi pendapatan personal. Pareto menjelaskan teorinya dengan menunjukkan distribusi normal dari fenomena umum kualitas manusia, dapat ditentukan rata-rata hitung dan kemudian setiap nilai individu pengamatan akan mempunyai simpangan dari nilai rata-ratanya. Jika semua penyimpangan ini digambarkan, maka akan terbentuk kurva normal yang disebut *curve of errors* (Hasibuan, 1993 : 11).

Akan tetapi kata Pareto, masyarakat manusia ditentukan oleh suatu hubungan kolektivitas yang bersih hirarkis. Kurva yang menceng tersebut bukanlah kurva kualitas manusia, tetapi fakta lain yang berhubungan dengan kualitas manusia. Kurva distribusi pendapatan tersebut pada bagian kiri lebih curam, oleh karena dibatasi oleh pendapatan minimum (yang terendah). Grafik berikut dapat menjelaskan konsep Pareto tersebut (Hasibuan, 1993 : 12)



Notasi : N Jumlah frekuensi penerima pendapatan pada setiap kelompok dan Y adalah tingkat pendapatan atau kelompok pendapatan yang diterima

Gambar 1. Kurva Kelompok Pendapatan Pareto

Gambar 1 di atas dibagi atas tiga daerah yang mempunyai implikasi sebagai berikut : (Hasibuan, 1993 : 12-13)

1. Garis ah adalah batas pendapatan kelompok berpendapat terendah. Daerah $ahHA$ merupakan kelompok penduduk yang sangat miskin yang tingkat kematiannya tinggi
2. Penduduk yang distribusi pendapatannya di daerah $AhbB$ belum begitu cukup tangguh untuk menghadapi perjuangan hidup, sehingga kelompok ini mempunyai tingkat kematian anak-anak yang cukup tinggi
3. Wilayah grafik yang ketiga adalah daerah Bbc . Penduduk pada kelompok ini hampir tidak dipengaruhi oleh faktor seleksi dan mempunyai daya tahan yang tinggi, sehingga lebih terhindar dari berbagai kelemahan fisik. Jika kelompok atas dan kelompok bawah ini berada dalam keadaan tidak seimbang dapat berakibat terjadinya keresahan sosial.

Uraian di atas adalah gambaran pertama dari teori Pareto tentang distribusi pendapatan personal, sedangkan selanjutnya ia menurunkan sebuah hukum pembagian pendapatan yaitu : *Jika sejumlah orang memperoleh pendapatan kurang dari y dalam keadaan menurun bila dibandingkan dengan sejumlah orang yang menerima pendapatan lebih besar dari y pada N_h , maka kesenjangan pembagian pendapatan secara proporsional menurun.* Hukum Pareto ini dinyatakan sebagai berikut : (Hasibuan, 1993 : 14)

$$N_h = \frac{A}{Y^\alpha} \text{ atau } N_h = Ay^{-\alpha}$$

Koefisien α disebut bilangan Pareto, semakin besar nilai α , maka menjadi semakin banyak orang yang tidak termasuk dalam kelompok berpendapatan tinggi.

Bilangan α tetap walaupun N_h dan y berubah-ubah. Secara populer hukum Pareto ini dapat dikatakan sebagai berikut : *Jika jumlah pendapatan naik 1% maka akan berakibat jumlah orang yang akan menerima pendapatan tersebut menurun $\alpha\%$* (Hasibuan, 1993 : 14).

Batas garis kemiskinan yang digunakan setiap negara berbeda-beda disebabkan adanya perbedaan dalam standar kebutuhan hidup. Biro Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan batas garis kemiskinan, yaitu nilai rupiah yang dibelanjakan per kapita sebulan dalam memenuhi kebutuhan hidup minimum, baik kebutuhan hidup makanan maupun kebutuhan bukan makanan. Untuk kebutuhan minimum makanan digunakan patokan 2.100 kalori per hari, sedangkan kebutuhan non makanan meliputi pengeluaran untuk perumahan, kesehatan, sandang, transportasi, aneka barang dan jasa, dan sebagainya (World Bank Institute dan BPS, 2002 : 179)

Analisis kemiskinan memiliki dimensi yang berbeda dengan distribusi pendapatan. Kedua konsep ini kadang-kadang digunakan secara bergantian untuk mencerminkan ketimpangan di dalam masyarakat. Soal kemiskinan adalah masalah kurangnya pendapatan seseorang dari tingkat garis kemiskinan yang ada. Karena itu, masalah kemiskinan tidak mempersoalkan pendapatan orang-orang yang ada di atas garis kemiskinan. Di pihak lain, masalah distribusi pendapatan adalah perbedaan pendapatan antara individu yang paling kaya dengan pendapatan individu yang paling miskin. Semakin besar jurang pendapatan (*income gap*) tersebut, semakin besar pula variasi dalam distribusi pendapatan. Di dalam masalah distribusi pendapatan tidak dikenal adanya garis kemiskinan (Nazara, 1997 : 44)

Dengan demikian kesejahteraan menyangkut standar kualitas hidup yang dapat dicerminkan berdasarkan batas pemenuhan kebutuhan minimum (garis kemiskinan). Pada bagian lain, ketimpangan dalam distribusi pendapatan juga dapat menjadi sebab banyaknya penduduk yang masuk kategori sebagai yang miskin (tidak sejahtera). Oleh karena itu, baik kemiskinan dan distribusi pendapatan juga merupakan pendekatan yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat.

Ada berbagai tolak ukur untuk menghitung ketimpangan dalam kaitan dengan tingkat pemerataan pendapatan, antara lain : Hukum Pareto, Koefisien Gini dan Kurva Lorenz, Hukum Gibrat, Indek Kuznet, kriteria Bank Dunia, dan sebagainya. Berbagai tolak ukur tersebut memiliki metode pendekatan dan kriteria tersendiri dalam melihat ketimpangan. Akan tetapi masing-masing ukuran mengenai distribusi pendapatan dapat melengkapi satu sama lain. Dari sekian tolak ukur tersebut yang paling sering digunakan untuk mengetahui ketimpangan distribusi pendapatan adalah Koefisien Gini dan kriteria Bank Dunia

Ukuran ketimpangan tunggal yang paling luas digunakan adalah Koefisien Gini. Koefisien Gini adalah ukuran ketidakmerataan agregat yang nilainya dapat bervariasi antara nol sampai satu. Bila koefisien Gini sama dengan nol berarti distribusi pendapatan adalah pemerataan sempurna karena setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama. Namun, bila Koefisien Gini sama dengan satu, maka menunjukkan ketidakmerataan sempurna karena seluruh pendapatan hanya dinikmati satu orang saja. Dengan kata lain, semakin tinggi Koefisien Gini maka semakin timpang

distribusi pendapatan. Sebaliknya, semakin rendah nilai koefisien Gini berarti semakin merata distribusi pendapatannya.

Penelitian Terdahulu

A. Hakim Basyar (1999) meninjau dampak perkebunan besar kelapa sawit dari segi sosial. Ia berpendapat bahwa perkebunan besar kelapa sawit tidak membawa nilai positif bagi masyarakat, dalam arti perbaikan tingkat kesejahteraan. Bahkan merupakan media efektif untuk menghancurkan perekonomian lokal berbasis sumberdaya hutan. Demikian pula dari sisi lingkungan, menimbulkan perubahan ekosistem yang sangat mendasar dengan diterapkannya sistem monokultur dan adanya input bahan-bahan kimiawi dalam pengusahaan tanaman kelapa sawit. (Basyar, 1999 : 63).

Dalam analisisnya, Hakim melihat bahwa konversi hutan untuk penyediaan areal perkebunan besar kelapa sawit akan menyebabkan aktivitas ekonomi rakyat dan kelembagaannya di pedesaan akan menjadi hancur. Kehancuran itu menurutnya dapat disebabkan oleh perubahan dalam manajemen SDA, hilangnya hak kepemilikan atas sumberdaya tanah, dan pola hubungan antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan menempatkan masyarakat hanya sebagai buruh perusahaan. Dalam penelitiannya di Kalimantan Timur, ia menunjukkan investasi baru dalam perkebunan besar dan industri kelapa sawit yang didukung dengan penyediaan lahan seluas 3,5 juta hektar akan semakin merugikan kehidupan masyarakat asli (dayak) di sekitar hutan yang sebelumnya sudah dirugikan oleh ekspansi HPH.

Dalam kesimpulannya, ia menyoroti rusaknya tatanan sosial masyarakat yang hidupnya tergantung pada pengelolaan sumberdaya hutan. Ketika secara paksa dan mendadak mereka harus kehilangan akses terhadap SDA, maka mereka telah dimiskinkan secara paksa. Keahlian yang mereka punyai dalam meramu dan mengelola SDA menjadi tidak terpakai. Akibatnya mereka kehilangan mata pencaharian dan kehilangan kemampuan untuk mengurus keluarganya. Hakim menggunakan pengukuran kualitatif yang meliputi karakteristik ekonomi dan sosial sebagai dampak perkebunan besar kelapa sawit untuk sampai pada kesimpulannya.

Penelitian Hasibuan (1977) tentang hubungan antara pengusahaan tanah dengan pembagian pendapatan Kasus Desa Kemumu di Bengkulu, menemukan bahwa pola distribusi sawah atau tanah relatif dapat menjelaskan keadaan pembagian pendapatan yang terjadi. Dalam penelitian itu, dengan menggunakan berbagai teknik pengukuran kepincangan, berupa logaritma penyimpangan baku, koefisien variasi, dan angka Gini, ternyata tingkat ketidakmerataan yang terjadi adalah ringan. Sebaliknya, jika pengukuran itu dilakukan dengan menggunakan ekuivalen 240 kg beras (kriteria miskin sekali menurut Sajogyo), maka tingkat ketidakmerataan disini sangat serius, apalagi jika harga yang digunakan adalah tingkat harga pada masa paceklik (Hasibuan, 1993 : 145)

Hasibuan juga menemukan bahwa distribusi penguasaan tanah yang diusahakan adalah sangat pincang di mana 86 persen petani mengusahakan tanah kurang dari 1 hektar, yang 46 persennya mengusahakan tanah di bawah 0,5 hektar. Dengan demikian terdapat hubungan yang positif antara luas tanah yang diusahakan dengan tingkat

pendapatan atau dengan kata lain intensitas penguasaan tanah sangat menentukan tinggi rendahnya pendapatan petani (Hasibuan, 1993 : 147-148).

Di samping itu, Hasibuan juga menjelaskan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perbedaan tingkat ketidakmerataan antara desa penelitian dengan desa lainnya, yakni perbedaan dalam sifat irigasi dan keadaan tanah serta ada tidaknya kegiatan luar usaha tani. Kedua faktor tersebut mempunyai pengaruh terhadap tingkat pendapatan yang diperoleh petani, sehingga juga dapat menjelaskan keadaan ketidakmerataan. Namun demikian, dapat terjadi ketidakmerataan yang tinggi bila pola penguasaan tanah semakin pincang sedangkan pertambahan penduduk meningkat dan perluasan tanah tidak terjadi.

Aart Schrevel (1988) berpendapat bahwa akses terhadap tanah tidak memadai lagi untuk menjadi indikator tingkat pendapatan rumah tangga pedesaan, namun menurutnya tetap saja pendapatan petani kecil baik dari usaha tani maupun luar usaha tani masih relatif rendah dibanding pendapatan petani kaya yang berlahan luas.

Dalam penelitiannya di daerah Cidurian Jawa Barat, *Schrevel* menemukan bahwa pendapatan per tahun petani dengan kategori kepemilikan tanah lebih dari 0,75 hektar dari hasil usaha tani ternyata adalah rata-rata 5 kali lipat pendapatan petani dengan kategori pemilikan lahan kurang dari 0,75 hektar dan tunakisma. Namun pendapatan luar usaha tani ternyata pada masing-masing kategori rata-rata besarnya relatif sama, hal mana menunjukkan bahwa pendapatan luar usaha tani menyumbang hampir semua total pendapatan petani berlahan sempit dan tunakisma.

Schrevel menyimpulkan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara akses tanah yang dimiliki dengan pendapatan yang diperoleh dari hasil usaha tani. Semakin luas tanah yang dimiliki satu rumah tangga, maka akan semakin besar pula pendapatan usaha tani yang mereka nikmati. Kemudian hubungan antara akses tanah dengan pendapatan luar usaha tani ternyata menunjukkan hubungan yang kurang kuat. Artinya, jumlah uang yang diterima dari bekerja di luar usaha tani tidak bergantung pada tanah yang dimiliki. Sedangkan hubungan antara akses tanah terhadap pendapatan total (usaha tani dan non usaha tani) bersifat sedikit positif dengan $Y = 0,22$. Berarti bahwa rumah tangga dengan tanah yang lebih luas, memiliki kecenderungan memperoleh total pendapatan yang lebih tinggi. (*Schrevel*, 1989, hal : 49-50)

Diferensiasi masyarakat pedesaan karena perbedaan kepemilikan tanah tidak hanya berdampak pada kedudukan ekonomi (pendapatan) tapi juga berpengaruh pada kedudukan sosial yang menimbulkan relasi tidak seimbang. Penelitian *Hiroyoshi Kano* di Malang selatan tahun 1977 menyimpulkan bahwa diferensiasi kedudukan sosial ekonomi di antara penduduk desa berhubungan erat dengan fragmentasi luas pemilikan tanah. Menurut Kano fragmentasi tersebut terjadi sebagai akibat dari pengaruh komersialisasi pertanian di mana kelas petani kaya akan menyewa atau membeli lahan untuk memperluas usaha pertaniannya terutama dalam budidaya tanaman perdagangan. (Kano, 1984, dalam Tjondronegoro dan Wiradi, Penyunting : 248-249)

METODE PENELITIAN

Ruang lingkup penelitian ini mencakup analisis tentang : Perbandingan kesejahteraan sebagai dampak perkebunan besar yang mencakup jarak waktu sebelum dan sesudah adanya perkebunan besar kelapa sawit dan bagaimana faktor penguasaan tanah mempengaruhi tingkat kesejahteraan tersebut. Penelitian ini dilaksanakan di lima desa di Kecamatan Kikim Kabupaten Lahat yang terlibat konflik agraria dengan perusahaan perkebunan besar kelapa sawit PT. Multrada Multi Maju (PMA Malaysia) dan PT. Perjapin Prima (PMDN)

Pengumpulan data dalam penelitian ini mencakup data yang bersifat sekunder dan primer. Data sekunder bersumber dari publikasi BPS dan lembaga lainnya. Kemudian dilengkapi juga dengan studi pustaka dari literatur yang relevan. Data primer diperoleh dari hasil pengolahan data yang berasal dari responden penelitian. Untuk mengumpulkan data primer ini digunakan pendekatan teknik wawancara berstruktur dan teknik kuisioner.

Penggunaan teknik analisis kuantitatif adalah untuk mengukur distribusi pendapatan yakni perhitungan koefisien Gini sebagai berikut : (Widodo, 1990 : 118)

$$GC = 1 - \sum_{i=1}^n (X_{i+1} - X_i) (Y_i + Y_{i+1})$$

Keterangan :

GC = Gini Coeficient

X_i = Proporsi jumlah penerima pendapatan dalam kelas i

Y_i = Proporsi Kumulatif pendapatan dalam kelas i

Selanjutnya pembagian pendapatan dapat diukur dengan Hukum Pareto sebagai berikut :

$$N_h = \frac{A}{Y^\alpha} \text{ atau } N_h = A Y^{-\alpha}$$

Notasi N adalah penduduk, Y adalah pendapatan, A adalah konstanta, dan α disebut bilangan Pareto

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanah dan Pembagian Pendapatan

Sebelum adanya perkebunan besar, masyarakat dapat mengakses tanah dengan luas yang relatif memadai bagi usaha tani (Tabel 2). Tetapi setelah adanya perkebunan besar, penguasaan tanah masyarakat menjadi relatif sempit, sebab akses ekonomi terhadap sumberdaya lahan (hutan) telah dihilangkan.

Tipe sistem produksi yang berkaitan dengan tanah dikalangan masyarakat Kikim adalah tipe campuran antara peladang menetap (tanaman keras) dan berputar (tanaman pangan) dengan variasi meramu hasil hutan. Pada wilayah desa yang tidak terdapat sawah berpengairan, maka kebutuhan lahan dengan mengakses hutan sangat penting utamanya untuk memenuhi kebutuhan pangan dan harapan peningkatan pendapatan dari tanaman perkebunan. Dengan demikian terlihat para petani bergantung pada diversifikasi pertanian dengan kebutuhan lahan yang relatif luas jika ingin mempertahankan tingkat produksinya.

Tabel 2. Penguasaan Tanah Oleh RT Sebelum dan Sesudah Perkebunan Besar (ha)

Nama Desa	Sebelum Perkebunan		Setelah Perkebunan	
	Jumlah	Rata-rata	Jumlah	Rata-rata
Wonorejo	58	3,86	7,25	0,48
Jajaran Baru	61	4,06	6,50	0,43
Jajaran Lama	54	3,60	10,00	0,66
Pagardin	39,5	2,63	12,25	0,81
Ulak Bandung	55	3,66	14,25	0,95

Sumber : Penelitian Lapangan, Kikim, 2003

Faktor tanah tetap relevan bagi pemecahan masalah pemerataan pendapatan, walaupun banyak penelitian yang menyatakan bahwa pendapatan dari luar usaha tani telah memberikan kontribusi yang besar bagi petani. Jika wilayah desa tersebut mempunyai aksesibilitas yang tinggi dengan kota, maka kecenderungan tersebut dapat dibenarkan. Akan tetapi wilayah desa penelitian umumnya jauh dari kota dengan transportasi yang relatif terbatas, sehingga kegiatan usaha tani masih mendominasi sumber pendapatan penduduk.

Berdasarkan golongan luas penguasaan tanah (Tabel 3), ternyata pada golongan penguasaan tanah (untuk usaha tani) yang lebih luas, rata-rata pendapatan RT per tahun juga lebih besar. Walaupun kesempatan kerja di luar pertanian mungkin meningkat, tetap saja mereka yang memiliki tanah luas yang lebih banyak mempunyai jangkauan terhadap kesempatan tersebut.

Tabel 3. Proporsi Pendapatan dan Rata-rata Pendapatan Rumah Tangga Menurut Golongan Luas Penguasaan Tanah

Golongan Luas Penguasaan Tanah (ha)	Jumlah RT (%)	Jumlah Pendapatan (%)	Rata-rata Pendapatan Per RT/Tahun (Rp)
Tunakisma	30,7	12,30	338.938
0,01 -0,49	21,3	13,11	519.379
0,50 – 0,99	24	19,33	680.770
1,00 - +	24	55,26	1.945.159

Sumber : Penelitian Lapangan, Kikim, 2003

Dari hasil observasi, terdapat kecenderungan RT yang berpendapatan relatif tinggi dari hasil bekerja di luar usaha tani baik di desa maupun luar desa (misal, anggota RT yang baru kembali dari bekerja di Batam) kemudian membeli tanah dari petani lainnya yang akhirnya semakin mendorong terjadinya polarisasi tanah di pedesaan. Pembelian tanah itu ditujukan agar keluarganya memiliki usaha tani yang dapat menambah pendapatan RT. Hal ini membuktikan bahwa masalah penguasaan tanah tetap merupakan aspek terpenting bagi masyarakat pedesaan.

Tabel 4. Perhitungan Koefisien Gini Menurut Pengeluaran Rumah Tangga Penelitian

Kelas Pendapatan	Pendapatan /bulan (Rp)	Pendapatan dalam kelas (%)	Proporsi Pendapatan Kumulatif (%)	Xi (%)
20% termiskin	4.605.588	7,26	7,26	20
20% menengah rdh	6.065.068	9,57	16,83	40
20% menengah	8.261.880	13,04	29,87	60
20% menengah atas	13.544.831	21,38	51,25	80
20% atas	30.895.041	48,75	100	100
Jumlah	63.372.408	100		

Sumber : Data Primer, Kikim, 2003

Berdasarkan tabel 4, Koefisien Gini dapat dihitung sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 GC &= 1 - (0,2 - 0) (0 + 0,0726) + (0,4 - 0,2) (0,0726 + 0,1683) + (0,6 - 0,4) (0,1683 + 0,2987) + (0,8 - 0,6) (0,2987 + 0,5125) + (1 - 0,8) (0,5125 + 1) \\
 &= 1 - (0,0145 + 0,0481 + 0,0934 + 0,162 + 0,302) \\
 &= 1 - 0,620 \\
 &= 0,38
 \end{aligned}$$

Menurut kriteria Oshima (ST. Widodo, 1990 : 120), ketimpangan rendah bila angka Gini kurang dari 0,3, ketimpangan sedang bila angka Gini terletak antara 0,3 – 0,4, dan ketimpangan tinggi bila angka Gini di atas 0,4.

Angka Gini sebesar 0,38 hampir mendekati angka 0,4 yang merupakan batas bawah untuk menunjukkan ketimpangan yang tinggi. Dengan mempertimbangkan berbagai kecenderungan dalam penguasaan tanah dan faktor lain yang mempengaruhi pembagian pendapatan, maka besarnya angka Gini tersebut mengindikasikan keadaan distribusi pendapatan yang cenderung untuk menjadi lebih tidak merata lagi. Apabila akses untuk perluasan lahan usaha tani semakin terbatas dan diikuti dengan penambahan penduduk, tidak menutup kemungkinan kepincangan yang terjadi akan semakin tinggi.

Sebelum adanya perkebunan besar, pendapatan kelompok atas dan kelompok bawah relatif seimbang. Keseimbangan tersebut menurut Pareto, berarti dalam masyarakat tidak terjadi keresahan sosial. Namun, setelah kehadiran perkebunan besar, maka dalam masyarakat muncul konflik sosial yang dipicu sengketa tanah yang menyebabkan pendapatan kelompok atas dan kelompok bawah menjadi relatif tidak seimbang. Kondisi demikian berarti dapat terjadi adanya penduduk yang bertambah kaya dan sebaliknya terdapat penduduk yang bertambah miskin akibat kehadiran perkebunan tersebut. Hal demikian dapat dilihat dari bilangan Pareto sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Log } N_h &= \text{Log } 0,846 - 0,0166 \text{ Log } y \\
 N_h &= e^{0,846} y^{-0,0166} \\
 N_h &= 2,71828^{0,846} y^{-0,0166} \\
 N_h &= 2,33 y^{-0,0166}
 \end{aligned}$$

Hasil perhitungan menunjukkan bilangan Pareto atau koefisien α adalah sebesar 0,0166 yang berarti makin tinggi pendapatan sebesar 1 persen maka makin sedikit yang menerima pendapatan sebesar 1,66 persen. Ini membuktikan bahwa dengan adanya perkebunan besar kelapa sawit menimbulkan petani kaya dan juga menyebabkan banyak petani menjadi miskin.

Berdasarkan kriteria Pareto, maka pola distribusi pendapatan menggambarkan bahwa 40 persen penduduk berpendapatan terendah ternyata pendapatannya masih berada di bawah kebutuhan subsisten. Kemudian 40 persen penduduk berpendapatan menengah ternyata belum cukup tangguh untuk menghadapi perjuangan hidup meskipun pendapatannya berada di atas kebutuhan subsisten. Selanjutnya 20 persen penduduk berpendapatan tinggi mempunyai daya adaptasi yang tinggi, sehingga memiliki taraf kesejahteraan yang lebih baik.

Pengeluaran Konsumsi dan Penguasaan Tanah

Tingkat kesejahteraan dapat diukur melalui besarnya konsumsi atau pengeluaran RT yang bersangkutan. Semakin besar konsumsi RT terutama porsi pengeluaran untuk bukan makanan, maka tingkat kesejahteraan RT yang bersangkutan semakin baik. Secara persentase, pengeluaran rata-rata per kapita sebulan pada RT penelitian untuk makanan adalah 68,77 persen dan bukan makanan adalah 31,23 persen. Sementara untuk Sumsel berdasarkan Susenas 2002, pengeluaran untuk makanan sebesar 63,75 persen dan untuk bukan makanan sebesar 36,25 %.

Tabel 5. Distribusi Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran Per Kapita Sebulan dan Penguasaan Tanah

Golongan Pengeluaran per Kapita Sebulan (Rp)	% Jumlah Penduduk	Jumlah Rumah Tangga	Rata-rata Tanah (ha)
40.000 – 59.999	23,34	17	0,04
60.000 – 79.999	18,76	14	0,17
80.000 – 99.999	16,24	12	0,3
100.000 – 149.999	11,44	9	0,47
150.000 – 199.999	6,63	5	1,15
200.000 – 299.999	9,38	7	1,28
300.000 dan lebih	14,18	11	2,20

Sumber : Penelitian Lapangan, Kikim, 2003

Pola konsumsi yang dominan pengeluaran makanan dibandingkan non makanan menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk desa di sekitar lokasi perkebunan besar relatif miskin. Sedikit penduduk desa yang kaya dan pengeluarannya untuk non makanan sudah lebih tinggi dari pengeluaran makanan. Kecenderungan konsumsi antara penduduk kaya yang lebih kepada non makanan dan penduduk miskin yang lebih mengutamakan konsumsi pangan, mengindikasikan suatu implikasi -menurut Pareto- adanya perbedaan dalam resistensi penduduk terhadap penyakit, kematian anak, kelemahan fisik, dan faktor seleksi.

Distribusi penduduk menurut golongan pengeluaran per kapita dan hubungannya dengan penguasaan tanah merupakan faktor yang tidak dapat diabaikan untuk menjelaskan struktur konsumsi penduduk dan pendapatannya. Tabel 5 menggambarkan hal tersebut.

Pada tabel 5, dari total anggota RT penelitian terlihat persentase terbesar pengeluaran penduduk per kapita sebulan terdapat digolongan pengeluaran terendah, yakni antara Rp.40.000 – Rp.59.999, dengan persentase sebesar 23,34 persen yang terdiri 17 RT di mana penguasaan tanah hanya seluas 0,04 hektar. Golongan pengeluaran tertinggi, persentase penduduknya sebesar 14,18 persen, terdiri dari 11 RT dengan penguasaan tanah rata-rata 2,20 hektar.

Kaitan antara penguasaan tanah dan pendapatan (dan seterusnya konsumsi) pada tabel 6 menunjukkan hubungan yang positif di mana semakin luas penguasaan tanah maka semakin tinggi pendapatan. Distribusi tanah yang akan mempengaruhi konsumsi (kesejahteraan) dapat dicermati dari rata-rata penguasaan tanah setelah perkebunan seluas 0,66 ha, sedangkan sebelum perkebunan mencapai seluas 3,56 ha.

Tabel 6. Hubungan Penguasaan Tanah dan Pendapatan Pasca Perkebunan

Tanah Pasca Perkebunan (ha)	Pendapatan Per Kapita Rata-rata	Jumlah Rumah Tangga	Persentase RT	Jumlah RT Miskin
0,00	65.104,11	23	30,66	23
0,25	106.882,44	16	21,33	10
0,50	118.898,37	16	21,33	7
0,75	96.783,65	2	2,66	1
1,00	262.532,60	3	4,00	-
2,00	285.208,06	12	16,00	-
3,00	452.122,15	2	2,66	-
4,00	538.319,30	1	1,33	-
T o t a l	146.081,51	75	100	41

Sumber : Penelitian Lapangan, Kikim, 2003

Perhitungan Koefisien Gini untuk penguasaan tanah yang diurutkan berdasarkan urutan pengeluaran RT, maka sebelum perkebunan besar kelapa sawit distribusi penguasaan tanah menunjukkan ketimpangan yang rendah yaitu hanya 0,19. Setelah ekspansi perkebunan ternyata distribusi penguasaan tanah menunjukkan ketimpangan tinggi sebesar 0,61.

Ketimpangan penguasaan tanah berpengaruh pada jumlah RT miskin di mana 41 RT penelitian atau 54,6 persen adalah RT miskin. Penguasaan tanah mereka ternyata kurang dari 0,75 hektar, bahkan terdapat 23 RT atau 30,6 persen adalah petani tak bertanah atau tunakisma.

Perbedaan pendapatan akibat ketimpangan penguasaan tanah diperparah oleh perbedaan dalam intensitas penggunaan tanah dan aspek pendukungnya. Modal untuk pemupukan dan pembasmian hama, peremajaan, dan pembukaan lahan baru, akan mempengaruhi produksi dan pendapatan. Kelompok berpendapatan tinggi lebih memiliki

kapasitas dibanding kelompok berpendapatan rendah. Pada kelompok berpendapatan tinggi, intensitas penguasaan tanah adalah lebih baik, sehingga semakin tinggi pendapatan semakin luas tanah yang dapat dikuasai dan diusahakannya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan golongan luas penguasaan tanah menunjukkan bahwa semakin luas tanah yang dikuasai maka semakin tinggi pendapatan yang diterima. Hal demikian terlihat dari rendahnya rata-rata penguasaan tanah sebelum perkebunan besar yang menunjukkan variasi perbedaan yang tinggi antar RT yang memiliki dengan tidak memiliki tanah. Kemudian dari aspek pendapatan yang diterima setelah perkebunan besar juga menunjukkan variasi ketimpangan yang tinggi antar pendapatan RT yang memiliki lahan luas dibanding dengan RT yang berlahan sempit.

Faktor penguasaan dan intensitas pemanfaatan tanah memberi pengaruh yang berarti terhadap tingkat pendapatan. Pada kelompok berpendapatan tinggi, tingkat penguasaan tanah juga relatif luas. Sebaliknya pada kelompok berpendapatan rendah, tingkat penguasaan tanahnya juga relatif rendah. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa kelangkaan sumberdaya tanah yang dapat diakses oleh petani menyebabkan pembagian pendapatan dalam masyarakat desa di sekitar lokasi perkebunan besar kelapa sawit cenderung menjadi tidak merata.

Saran-Saran

1. mengingat tanah merupakan faktor produksi penting dalam kehidupan petani, maka adanya kebijakan mendasar dalam redistribusi tanah (Land Reform) yang dapat mendorong terciptanya keadilan dan perbaikan pendapatan petani di pedesaan sangat penting dilakukan oleh pemerintah.

DAFTAR RUJUKAN

- Basyar, A, Hakim, *Perkebunan Besar Kelapa Sawit : Blunder Ketiga Kebijakan Sektor Kehutanan*, Penerbit E-Lawa dan CePAS, Jakarta, 1989.
- BPS, *Statistik Kesejahteraan Rakyat*, Jakarta, Berbagai Edisi dan Tahun.
- BPS. *Lihat Dalam Angka*, Berbagai Edisi dan Tahun.
- Dinas Perkebunan Propinsi Sumatera Selatan, *Renstra Perkebunan dan Profil Perkebunan Besar di Sumsel*, Palembang, 2001.
- Forest Watch Indonesia/Global Forest Watch, *Potret Keadaan Hutan Indonesia*, Bogor Indonesia, Washington DC, 2001.
- Hasibuan, Nurimansjah, *Pemerataan dan Pembangunan Ekonomni : Teori dan Kebijaksanaan*, Penerbit Universitas Sriwijaya, Palembang 1993.

- Kano, Hiroyoshi, *Sistem Pemilikan Tanah dan Masyarakat Desa di Jawa Pada Abad XIX*, dalam Tjondronegoro et al, *Dua Abad Penguasaan Tanah : Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1984.
- Nazara, Suahasil, *Garis Kemiskinan dan Pengentasan Kemiskinan : Kerangka Teori Foster-Greer-Thorbecke*, dalam *Prisma* No.1 Tahun XXVI, Jakarta, 1997.
- Sudarsono, *Pengantar Ekonomi Makro*, Penerbit LP3ES, Jakarta, 1983.
- Sawit Watch, *Tandan Sawit*, No.01, Bogor 2001
- Sawit Watch, *Tandan Sawit*, Volume 3 Tahun 1, Bogor 2001
- Sawit Watch, *Tandan Sawit*, Volume 4 Tahun 1, Bogor 2001
- World Bank Institute dan BPS, *Dasar-Dasar Analisis Kemiskinan*, BPS, Jakarta, 2002.
- Widodo, Suseno T, *Indikator Ekonomi : Dasar perhitungan Perekonomian Indonesia*, Penerbit Kanisius, Jakarta, 1990.
- Zakaria, R Yando, *Hutan dan Kesejahteraan Masyarakat*, Walhi, Jakarta, 1994.